

## **NASIONALISME-KEDAULATAN DALAM VISI PRESIDEN KE-1 SOEKARNO DAN PRESIDEN KE-8 PRABOWO SUBIANTO**

**Didin Sabarudin**

Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

E-mail: didinsabarudin@ukri.ac.id

**Abstract:** Nationalism and sovereignty are two words that are always attached to two figures of Indonesian national leaders, namely the 1st President Soekarno and the 8th President Prabowo Subianto. The nationalism and sovereignty echoed by the two Presidents are based on the empirical objective conditions faced by the Indonesian nation in the form of *nationale geest* (national spirit), *nationale will* (national will), and *nationale daad* (national action). Soekarno implemented nationalism and sovereignty based on the trisakti philosophy transformed by Prabowo Subianto during his administration with the symbol "Indonesia first, make Indonesia great again" as the identity of the internal sovereignty project and external sovereignty: "Si Vis Pacem Para Bellum and I want to be your friend, I want to be your partner, but I can not be your peon". This study captures and elaborates the nationalism-sovereignty of Soekarno and Prabowo Subianto through a study of documentation literature. The historical method with a qualitative approach is used to interpret the implementation of nationalism-sovereignty through the vision of Soekarno and Prabowo Subianto. The results of the study show that nationalism and sovereignty are the characteristics of national ideology as well as legitimate identity in Soekarno and Prabowo Subianto so that they received international recognition in the form of the 20th century Memory of the World for Soekarno's Speech before the UN General Assembly in 1961 for Soekarno and Prabowo Subianto including one of the most influential Muslim figures in the world in 2023.

**Keywords:** nationalism, prabowo subianto, soekarno, sovereignty

**Abstrak:** Nasionalisme dan kedaulatan adalah dua kata yang selalu melekat pada dua sosok pemimpin bangsa Indonesia, yaitu Presiden ke-1 Soekarno dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Nasionalisme dan kedaulatan yang digemakan oleh kedua Presiden berdasarkan kondisi objektif empiris yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam bentuk *nationale geest* (semangat nasional), *nationale will* (kehendak nasional), dan *nationale daad* (perbuatan nasional). Soekarno mengimplementasikan nasionalisme dan kedaulatan berdasarkan falsafah trisakti yang ditransformasikan oleh Prabowo Subianto pada era pemerintahannya dengan simbol "*Indonesia first, make Indonesia great again*" sebagai identitas projek kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal: "*Si Vis Pacem Para Bellum* dan *I want to be your friend, I want to be your partner, but I can not be your peon*". Kajian ini memotret dan mengelaborasi nasionalisme-kedaulatan Soekarno dan Prabowo Subianto melalui studi literatur dokumentasi. Metode historis dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk memaknai implementasi nasionalisme-kedaulatan melalui visi Soekarno dan Prabowo Subianto. Hasil kajian menunjukkan nasionalisme dan kedaulatan menjadi ciri ideologi kebangsaan sekaligus identitas legitimasi dalam diri Soekarno dan Prabowo Subianto sehingga memperoleh rekognisi internasional dalam bentuk *Memori of World* abad 20 atas Pidato Soekarno di depan Sidang Umum PBB tahun 1961 untuk Soekarno dan Prabowo Subianto termasuk salah satu tokoh muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2023.

**Kata Kunci:** kedaulatan, nasionalisme, prabowo subianto, soekarno

### **PENDAHULUAN**

Nasionalisme merupakan kekuatan terbesar lebih dari 200 tahun dalam politik dunia yang berkontribusi pada pecahnya berbagai perang dan revolusi dengan kelahiran negara-negara baru yang digunakan untuk menggulingkan maupun mendukung rezim-rezim

berkuasa. Nasionalisme menjadi pencapaian terbesar terhadap pengukuhan bangsa-bangsa sebagai unit terpenting kekuasaan politik, dimana terma negara-nasional diterima sebagai bentuk organisasi paling mendasar dan satu-satunya bentuk organisasi politik yang sah. Nasionalisme Indonesia lahir sejak Sumpah Pemuda 1928 melawan kolonialisme sampai mencapai puncaknya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan Pancasila menjadi falsafah dan ideologi bangsa disertai penetapan konstitusi UUD 1945 sebagai pengikat dan tujuan bangsa dan negara Indonesia berdaulat, yaitu: 1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) memajukan kesejahteraan umum, 3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Nasionalisme dan kedaulatan menjadi kesatuan tunggal tak terpisahkan terus bergema dibawa oleh para pemimpin bangsa sejak era kemerdekaan mulai dari Presiden pertama Soekarno sampai era reformasi di masa pemerintahan Presiden ke-8 Prabowo Subianto (2023) melalui visi yang tertuang dalam memori tertulis karyanya berjudul “Gagasan Strategis Prabowo Subianto: Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia Menjadi Negara Maju dan Makmur”. Pencanangan visi nasionalisme tersebut hendak menggapai cita-cita abadi negara: “Indonesia merdeka untuk jadi negara yang kuat dan dihormati. Menjadi negara yang disegani karena rakyatnya hidup sejahtera. Rakyatnya adil dan makmur. Rakyatnya hidup tanpa penindasan. Rakyatnya hidup bahagia dari Sabang sampai Merauke”, kemudian diimplementasikan menjadi 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat sebagai respon menghadapi berbagai dinamika tantangan strategis global, seperti perubahan iklim, konflik bersenjata di Ukraina dan Palestina, ketidakstabilan geopolitik, ancaman pandemi baru, perlambatan ekonomi global, meningkatnya populasi, serta disrupsi *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan). Selain itu juga Indonesia menghadapi tantangan strategis nasional dengan masalah terbatasnya waktu bonus demografi untuk keluar dari *middle income trap*, *net outflow of national wealth*, ketidakadilan ekonomi, serta gizi dan kualitas sumber daya manusia.

Tantangan strategis nasional tentang kualitas sumber daya manusia tentunya terkait dengan pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi dan tercakup di dalam 8 Misi Asta Cita, yaitu semua anak bangsa bisa sekolah dan menuntut ilmu terbaik dengan lancar. Nasionalisme Prabowo Subianto dalam bidang pendidikan terlihat dengan komitmennya melalui pendidikan tinggi sejak 1985 berawal dari Institut Teknologi Adityawarman (ITA) yang didirikan oleh Prof. Sumitro Djojohadikusumo memiliki dua fakultas menaungi empat program studi (prodi). Sejak 2002 berubah menjadi Universitas Kebangsaan (UK) dengan penambahan tiga fakultas dan enam prodi baru, kemudian tahun 2021 berubah kembali menjadi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) dengan menambah satu fakultas dan dua prodi yang direncanakan kemudian akan ditambah lagi dengan dua fakultas baru untuk menggapai visi “Menjadi universitas pembelajaran dan riset yang mandiri, inovatif, dan unggul di tingkat nasional serta menjadi salah satu pusat pengembangan peradaban dan ketahanan bangsa” (<https://www.ukri.ac.id/about/visi>). Kampus ‘Kebangsaan’ merupakan realitas identitas nasionalis yang melekat pada sosok Prabowo Subianto dan berkontribusi pada peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan tinggi khususnya. Kedaulatan kampus menemukan relevansi kuat dalam nasionalisme kebangsaan dengan keluarnya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen sebagai peningkatan tata kelola profesi dan karier dosen yang lebih baik, efektif, dan efisien, serta memberikan kepastian hukum terhadap pemberian tunjangan serta penghasilan bagi dosen. Terbitnya aturan tersebut merupakan respon terhadap regulasi sebelumnya, yaitu Perpres 59/2017 dan Perpres 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang secara garis besar memuat dan mengatur juga SDGs.

**TINJUAN PUSTAKA****Nasionalisme**

Ide tentang nasionalisme dan bangsa-bangsa besar muncul pada akhir abad ke-18 berdasarkan pandangan banyak pengamat sebagai produk Revolusi Perancis, dimana penduduk negeri yang ada merupakan sebuah subjek dengan identitas politiknya dibentuk oleh kesetiaan pada penguasa atau dinasti penguasa daripada apa yang disebut identitas nasional atau patriotisme (Kedourie, 1986). Para revolusioner Perancis yang meruntuhkan kekuasaan monarki despotis Louis XVI melakukannya atas nama rakyat yang dipahami sebagai bangsa Perancis. Karenanya, nasionalisme merupakan credo revolusi dan demokrasi yang mencerminkan ide bahwa subjek para raja seharusnya adalah warga Perancis. Doktrin kebangkitan nasionalisme menyebar ke daratan Eropa pada abad-19 dan ke seluruh belahan dunia pada abad-20. Dalam kondisi seperti itu, nasionalisme merupakan sebuah fenomena politik yang kompleks dan kontroversial dengan keyakinan bahwa bangsa merupakan prinsip organisasi politik paling mendasar. Namun, kata bangsa, negara, negeri, atau ras sering maknanya rancu dan dipertukarkan, misalnya Inggris, apakah harus dianggap sebagai sebuah bangsa atau sebuah negara yang meliputi empat bangsa: yaitu Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Problem serupa terjadi pada masyarakat Arab dari Afrika Timur dan Timur Tengah, seperti Mesir, Libya, Irak, dan Suriah dianggap sebagai bangsa yang terpisah atau sebagai bagian dari bangsa Arab tunggal bersatu berdasarkan pada kesamaan bahasa (Arab), kesamaan agama (Islam) atau kesamaan keturunan dari suku Badui di masa lampau. Demikian juga dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan organisasi dari negara-negara, bukan organisasi dari populasi kebangsaan.

Sumber kesulitan yang timbul merupakan fakta bahwa semua bangsa meliputi campuran faktor subjektif-objektif dan perpaduan karakteristik kebudayaan dengan politik (Heywood, 2014). Kontroversi nasionalisme memperparah kerancuan faktor-faktor yang mendefinisikan bangsa, apakah nasionalisme merupakan perasaan, identitas, doktrin politik, ideologi, atau gerakan sosial? Apakah kemunculannya merupakan fenomena alami atautkah sesuatu yang dirancang? Para saintis nasionalisme terpecah sejak 1970-an menjadi dua kelompok besar: primordialis dan modernis (Hearn, 2020). Primordialisme menggambarkan identitas kebangsaan sebagai identitas yang melekat secara historis berakar pada persamaan warisan kebudayaan dan bahasa yang terbentuk jauh sebelum adanya negara atau perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, maknanya bahwa nasionalis adalah primordialis. Pandangan ini dapat dilihat pada tulisan filsuf Jerman Johan Herder (1744-1803) dengan pendapatnya bahwa bangsa memiliki *Volkgeist* yang terlihat dari lagu-lagu, mitos, dan legenda sebagai sumber kreativitas kepada bangsa. Implikasi kulturalisme ini merupakan identitas alami atau organik yang berasal dari masa kuno dan akan berlanjut selama masyarakat manusia masih ada dengan cara sama atau merupakan kesinambungan antara komunitas kebangsaan modern dan komunitas etnis pra-modern yang disebut etnis (Smith, 2008): bahwa nasionalisme merupakan salah satu varian etnisitas, dimana bangsa-bangsa modern merupakan versi komunitas etnis masa lalu yang diperbaharui.

Sebaliknya, pendekatan modernis pada nasionalisme mengemukakan bahwa identitas nasional terbentuk sebagai respon terhadap perubahan keadaan sosial dan historis yang menghubungkan asal mula nasionalisme dengan proses modernisasi, terutama kemunculan industrialisasi, seperti masyarakat-masyarakat pra-modern terdiri jaringan ikatan dan loyalitas feodal, sedangkan masyarakat industri baru mempromosikan mobilitas sosial, perjuangan diri, dan kompetisi, sehingga membutuhkan sumber kekompakan kultural baru yang disediakan oleh nasionalisme, artinya bahwa nasionalisme membentuk bangsa, bukan sebaliknya (Gellner, 2006). (Anderson, 2006) menggambarkan bangsa-bangsa modern sebagai produk perubahan sosial, ekonomi, dan menekankan perpaduan dampak dari kemunculan kapitalisme dan kemajuan komunikasi massa modern, sehingga bangsa adalah komunitas khayalan, dimana individu hanya bertemu dalam jumlah sangat sedikit dengan orang-orang yang dianggap satu bangsa. Jika memang ada bangsa merupakan khayalan

semata yang dibentuk melalui pendidikan, media massa, dan proses sosialisasi politik. Kelompok Marxis, seperti Hobsbawm (2012) cenderung memandang nasionalisme sebagai alat yang digunakan oleh kelas berkuasa untuk mencegah ancaman revolusi sosial dengan menjamin bahwa loyalitas kebangsaan lebih kuat daripada solidaritas kelas dengan mengikat kelas pekerja pada struktur kekuasaan.

### **Kedaulatan**

Negara adalah sebuah lembaga historis muncul di Eropa abad ke-15 dan 16 sebagai sistem kekuasaan terpusat dengan menundukkan semua lembaga atau kelompok lain yang bersifat sementara dan spiritual ditandai oleh Perdamaian Westphalia (1648) dengan pengertian formal modern tentang status pengakuan *statehood* (negara merdeka). Penetapan negara sebagai entitas berdaulat menjadikannya para pelaku utama dalam panggung dunia yang disebut sebagai sistem negara dalam politik internasional. Sistem negara tersebut meluas dari Eropa ke Amerika dan Jepang selama abad ke-19 dan menjadi sistem mengglobal pada abad 20 berkat proses dekolonisasi di Asia, Afrika, Karibia, dan Pasifik. Negara memiliki struktur dualistik, dua wajah, satu menghadap ke luar dan satu menghadap ke dalam (Cerny, 2013). Wajah negara menghadap ke luar terkait hubungan dengan negara lain dan kemampuannya menyediakan perlindungan terhadap serangan dari luar, seperti dinyatakan dalam Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara (1933) dengan empat ciri negara, yaitu: memiliki teritori yang jelas, populasi permanen, pemerintahan efektif, dan kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain.

Wajah negara menghadap ke dalam terkait hubungan negara dengan individu dan kelompok yang hidup dalam batas teritorinya sebagai kemampuan memelihara tatanan domestiknya. Sosiolog Jerman Max Weber (1864-1920) mendefinisikan negara dari sudut pandang monopoli atas alat-alat kekerasan yang sah (*legitimate violence*) yang dilengkapi oleh (Schumpeter, Schumpeter, and Perlman 1994) bahwa negara juga memiliki monopoli atas hak memberlakukan pajak. Dalam struktur ganda negara yang disebut *statehood* dipandang sebagai kemampuan untuk melindungi dari serangan luar dan memelihara tatanan domestik serta melakukan keduanya secara simultan (Brenner, 2011). Meski ciri negara tidak eksplisit disebutkan dalam Konvensi Montevideo atau definisi Weber tentang monopoli penggunaan kekuasaan yang sah, ciri mendasarnya sebagai ciri utama tunggal adalah kedaulatan. Analisisnya bahwa negara menjadi negara karena mampu menyelenggarakan hukum berdaulat di dalam batas wilayahnya dan menjadi pelaku otonom sekaligus independen, seperti dinyatakan teoritikus utama awal tentang kedaulatan oleh filsuf Perancis Jean Bodin (1530-1596) mendefinisikan kedaulatan sebagai “kekuasaan yang absolut dan abadi atas kekayaan bersama”.

Konsep tentang kedaulatan internal merujuk pada posisi kekuasaan atau otoritas dalam sebuah negara dan krusial bagi pembangunan struktur-struktur negara dan sistem pengaturannya, seperti raja-raja absolut yang mendeskripsikan dirinya sebagai penguasa berdaulat sebagaimana raja Perancis Louis XVI pada abad ke-17 memproklamkan diri sebagai negara. Pergeseran ide paling radikal tentang kedaulatan absolut terjadi pada abad ke-18 dengan penolakan filsuf kelahiran Swiss J. J. Rousseau terhadap kekuasaan monarkis dan dukungan bagi kedaulatan rakyat, dimana otoritas tertinggi berada di tangan rakyat yang diekspresikan dalam ide tentang kehendak bersama. Doktrin ini pula yang sering dipandang sebagai landasan teori modern tentang demokrasi yang menginspirasi ide demokrasi liberal bahwa satu-satunya sumber otoritas politik yang sah adalah penyelenggaraan pemilihan umum berkala, jujur, adil, dan kompetitif.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data yang mengandalkan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, atau laporan dalam

bentuk tertulis dan audio visual terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu nasionalisme dan kedaulatan Nasir (1998) atau yang disebut Gottschalk (1986) sebagai studi literatur dokumentasi. Jenis penelitian dalam kajian ini adalah studi historis atau sejarah yang menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau dan menuliskan hasilnya berdasarkan fakta yang telah diperoleh, sehingga menjadi penyajian dan cerita sejarah yang dapat dipercaya (Ismaun, 2005).

Kajian ini merupakan upaya untuk menjelaskan atau menganalisis individu, organisasi, kelompok atau pola interaksi sosial yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan interpretasi melalui pemberian makna, menerjemahkan, atau menjadi data itu sendiri (Patten&Newhart, 2018), dimana nasionalisme dan kedaulatan yang disuarakan oleh Presiden ke-1 Soekarno dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto memberikan identitas dan legitimasi kedua pemimpin memengaruhi pembangunan identitas nasional Indonesia sesuai era pemerintahannya masing-masing yang pada dasarnya objektif dan absolut (Abdurahman, 2007) berlandaskan pada fase historiografi nasional yang dilakukan dalam perspektif bangsa Indonesia melalui pendekatan multidimensional keilmuan, bukan saja mengangkat sejarah, pandangan, dan intensi orang-orang besar dan negara, tetapi lebih pada kemanusiaan atau kebudayaannya (Adam, 2007). Karenanya, kajian ini memfokuskan pada topik yang relevan dengan maksud melihat peristiwa, hubungan, pengalaman, atau proses secara mendalam untuk membantu penulis menghubungkan tingkat mikro atau kegiatan seorang individu terhadap tingkat yang lebih makro atau pada skala yang lebih besar melalui struktur sosial dan proses (Neuman, 2000).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Nasionalisme dan Transformasi Bangsa**

Nasionalisme Indonesia terlahir dan dilahirkan sebagai bangsa melalui proses panjang perjuangan entitas kelompok, etnis, ras, dan kebudayaan yang dipersatukan dari sudut pandang objektif oleh kesamaan nilai dan tradisi, terutama bahasa, agama, dan sejarah yang biasanya menempati wilayah geografis sama. Persatuan kebudayaan yang dianggap mengekspresikan diri dalam bentuk kebangsaan sulit dipastikan karena mencerminkan beragam kombinasi dari faktor kebudayaan yang menekankan fakta bahwa bangsa hanya dapat didefinisikan secara subjektif oleh para anggota di dalamnya. Analisanya, bahwa bangsa adalah sebuah entitas psiko-politik yang menganggap diri kelompok masyarakat mereka sebagai komunitas politik yang bercirikan kesamaan loyalitas dan rasa cinta dalam bentuk patriotisme. Dimensi politik kebangsaan terbukti dalam perbedaan antara bangsa dan kelompok etnis yang memiliki identitas komunal dan rasa kebanggaan kultural, namun tidak memiliki aspirasi politik kolektif yang berusaha membentuk dan memelihara daulat kemerdekaan atau otonomi politik. Dimensi psikologis kebangsaan terlihat pada ketahanan aspirasi nasionalis, meski menghadapi kesulitan-kesulitan objektif yang besar, seperti ketiadaan lahan, populasi yang kecil, dan ketiadaan sumber daya ekonomi.

Nasionalisme primordialis Indonesia mewujudkan dalam bentuk identitas kolektif yang menyatukan berbagai perbedaan identitas namun memiliki persamaan historis dan warisan kebudayaan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 dengan pernyataan “satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia”. Sumpah Pemuda merupakan inisiatif kaum terdidik dan terpelajar yang tergabung dalam perkumpulan Budi Utomo menjadi inspirasi para pejuang dari beragam latar belakang untuk bersatu atas nama Indonesia berjuang melawan imperialisme dan kolonialisme yang menguasai geografis Nusantara. Perlawanan dan perjuangan era kemerdekaan pulalah mempersatukan bangsa Indonesia melahirkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi berbangsa dan bernegara yang mencapai puncaknya dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 oleh duet proklamator Soekarno-Hatta serta dalam waktu relatif singkat telah mampu menyusun konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai cermin *volkgeist* dan wujud implementasi patriotisme, yaitu kesamaan loyalitas serta rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Konsep wong cilik digunakan Soekarno untuk merepresentasikan rakyat Indonesia

yang dimelaratkan oleh imperialisme dan kapitalisme eksploitatif kaum borjuis sebagai sosialisme Indonesia dalam praktik (Adams 2011). *Volkgeist* primordial dalam bentuk deklarasi Indonesia merdeka menjadi identitas politik kebangsaan yang terus disuarakan oleh Soekarno dalam multi forum domestik dan internasional, dimana identitas politik (*political identity*) merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan komunitas politik (Sabarudin, 2021). Identitas politik kemudian terepresentasikan dalam identitas resisten (*resistance identity*) (Castells and Castells, 2010) Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan negara merdeka dan berdaulat dengan penolakannya terhadap imperialisme dan kolonialisme melalui istilahnya yang terkenal anti-nekolim (neo-kolonialisme dan neo-imperialisme) pada era kemerdekaan. Wujud nyata anti-nekolim Soekarno adalah menolak hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar (1949) yang mengharuskan Indonesia menjadi anggota IMF dan membayar utang warisan kolonial Belanda 4,7 miliar gulden atau 1.130 juta dolar Amerika dan membebaskan perusahaan asing beroperasi di Indonesia (Dewi, 1988) serta Indonesia membatalkan secara sepihak dan tidak terikat lagi dengan seluruh perjanjian KMB melalui pengesahan UU nomor 13/1956. Hal tersebut menjadi ideologi yang berfungsi sebagai pemaknaan terhadap penjelasan dan pengertian realitas kegiatan eksistensi negara yang berakar pada narasi sejarah (Sabarudin, 2021, 2024:21). Nasionalisme modernis Indonesia pasca kemerdekaan ditunjukkan oleh Presiden Soekarno melalui mobilitas sosial bagi kepentingan nasional Indonesia sebagai negara bangsa merdeka dan berdaulat yang disampaikan melalui pidato 90 menit pada SU PBB tahun 1961 berjudul *To Build the World A New* dengan menyerukan anti-imperialisme, anti-kolonialisme, dan memperkenalkan ideologi Pancasila kepada dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui sidang pleno Executive Board untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO) pada 10-24 Mei 2023 kemudian menetapkan pidato Presiden Soekarno sebagai salah satu arsip Memori Kolektif Dunia (*Memory of the World*) dari Tiga Tinta Emas Abad 20 yaitu: Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung 1955 dan Gerakan Non-Blok Pertama di Beograd 1961 ([https://www.aahlulbaitindonesia.or.id/berita/s13-PBB Tetapkan Pidato Bung Karno Sebagai Memori Kolektif Dunia](https://www.aahlulbaitindonesia.or.id/berita/s13-PBB%20Tetapkan%20Pidato%20Bung%20Karno%20Sebagai%20Memori%20Kolektif%20Dunia), posting 26 Mei 2023 dan diakses 29 September 2024).

Nasionalisme primordialis dan modernis Soekarno era kemerdekaan muncul kembali pada era reformasi oleh sosok calon Presiden tahun 2014 dan 2019, Prabowo Subianto yang menjelaskan pernyataan sikapnya sudah konsisten sejak hampir dua dekade bahwa paham ekonomi kapitalisme neo-liberal terbukti gagal menyejahterakan masyarakat dengan cara mendorong orang untuk kaya tanpa menghiraukan bagaimana cara memperoleh kekayaan tersebut dan keserakahan dibenarkan, seperti ditegaskannya pada Seminar Nasional Kebangsaan bersama 1.000 Guru Besar, Rektor, dan Cendekiawan se-Indonesia di Jakarta, 20 September 2023 (<https://news.detik.com/pemilu/d-6958011/prabowo-tegaskan-kapitalisme-neoliberal-keliru-dan-terbukti-gagal>). Kondisi yang dialami oleh bangsa pernah juga disampaikan Prabowo Subianto dalam pidato kebangsaan di kampus UKRI 8 Maret 2019 bahwa tantangan terbesar Indonesia adalah mengalirnya atau bocornya kekayaan kita ke luar negeri. Kita jadi sapi perahan, dari 11.000 triliun hanya 5.400 triliun di dalam negeri atau 2/3 kekayaan kita. Apa yang terjadi adalah *political capture*, pejabat-pejabat pemerintah sebagian besar telah berhutang budi atau dikendalikan oleh mereka-mereka yang punya uang besar dan uang banyak, akhirnya kebijakan-kebijakan tidak untuk rakyat banyak, tetapi untuk orang-orang yang punya uang banyak seperti perkataan Hakim Agung AS Louis Brandeis "*we may have democracy or we may have wealth concentrated in the hands of the few, but we can not have both*", artinya kita boleh punya demokrasi atau kita punya kekayaan hanya di tangan segelintir orang, tapi tidak mungkin kita punya dua-duanya. Ini berlaku di Amerika Serikat, sekarang berlaku di Republik Indonesia. Jadi kita harus berjuang agar demokrasi kita benar-benar terwujud. Tantangan ekonomi kita adalah harus tumbuh diatas dua digit baru kita selamat, faktanya gagal tumbuh ([https://www.youtube.com/watch?v=8\\_9f-fvx1I1](https://www.youtube.com/watch?v=8_9f-fvx1I1)).



Sumber: reporter.id

Gambar 1  
Pengarahan Prabowo Subianto kepada kader Partai Gerindra 2024

Gambar di atas semakin faktual menunjukkan nasionalisme Prabowo Subianto ditransformasikan sebagai identitas patriotismenya ketika telah ditetapkan menjadi Presiden ke-8 dengan pernyataan dan pesan kepada para kader Partai Gerindra yang lolos ke DPR periode 2024-2029 di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang-Bogor, 23 September 2024: “Hidup saya, sumpah saya, saya ingin mati di atas kebenaran, saya ingin mati membela rakyat saya. Dan ditegaskannya bahwa saya ingin mati membela orang miskin, saya ingin mati membela kehormatan bangsa Indonesia, saya tidak ragu-ragu”, ([https://reporter.id/2024/09/24/40/hot isu pagi ini, prabowo bersumpah, ingin mati m... diakses 9 Oktober 2024](https://reporter.id/2024/09/24/40/hot%20isu%20pagi%20ini,%20prabowo%20bersumpah,%20ingin%20mati%20m...)). Pernyataan yang disampaikan Presiden ke-8 dan Ketua Umum Partai Gerindra di atas tentunya berdasarkan data, bila merujuk pada berita resmi statistik terkini Maret 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin sebesar 9,03 persen berjumlah 25,22 juta penduduk miskin dengan komposisi berada di perkotaan 7,09 persen atau 11,64 juta orang dan di perdesaan berjumlah 13,58 orang atau 11,79 persen yang mayoritas berada di pulau Jawa untuk perkotaan 7,22 persen dan perdesaan 11,32 persen. Sedangkan garis kemiskinan pada Maret 2024 adalah Rp582.932,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp433.906,- (74,44 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp149.026,- (25,56 persen) dengan rata-rata rumah tangga miskin memiliki 4,78 orang anggota rumah tangga dan garis kemiskinan per rumah tangga secara rerata Rp2.786.415,-/rumah tangga miskin/bulan (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentasependudukmiskinmaret2024turunmenjadi9,03persen>). Meski penduduk miskin turun, namun jumlahnya masih banyak, terlebih bila merujuk pada hitungan *purchasing power parities* (PPP) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia merubah ketentuan PPP 2011 dengan basis perhitungan kemiskinan ekstrem dari US\$1.90 menjadi PPP 2017 menetapkan US\$2.15/orang/hari dan bila menggunakan basis perhitungan US\$3 dengan batas penghasilan menengah ke bawah dinaikkan menjadi US\$3.65/hari dari sebelumnya US\$3.20 dan batas penghasilan menengah ke atas menjadi US\$6.85 dari sebelumnya US\$5.50/hari, maka perubahan tersebut memberikan berdampak fantastis, dimana 40 persen atau 110 juta warga Indonesia akan tergolong orang miskin (<https://www.cnbcindonesia.com/research20230510172601-128-4362/bankduniaubahdata110jutawargaRIjadimiskin>).

Keberpihakan Prabowo Subianto terhadap warga miskin merupakan identitas primordialis yang mewujud sebagai bentuk patriotisme melalui pernyataannya dalam berbagai forum atas kegagalan paham ekonomi neo-liberalisme menyejahterakan rakyat. Identitas politik yang terbangun selama dua dekade ini dalam sosok Prabowo Subianto menjadi identitas resisten yang memiliki kesamaan dengan sosok Presiden ke-1 Soekarno, kemudian termanifestasikan dalam bentuk identitas legitimasi (*legitimizing identity*) (Castells and Castells, 2010) sebagai Presiden ke-8 Indonesia untuk meningkatkan identitas kebangsaan serta mencapai visi Indonesia Adil dan Makmur yang akan diwadahi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029. Kontribusi nyata yang dilakukannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui transformasi pendidikan tinggi sebagai capaian indikator ke-empat dalam RPJPN 2045 menjadi prioritas pembangunan dan program kerja utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan memperbaiki ketimpangan (Subianto, 2023). Faktanya adalah pemilihan nama kampus 'Kebangsaan' merupakan salah satu realitas identitas Prabowo Subianto, dimana nasionalisme terus melekat dalam sosoknya yang jauh menjangkau peradaban dalam dinamika kehidupan bangsa dan antar bangsa di era global. Realitas keberpihakannya terhadap pendidikan tinggi khususnya ditransformasikan dalam 8 program prioritas untuk mencapai sasaran prioritas ke-6 dari 17 sasaran dalam era pemerintahannya dengan dana riset dan inovasi diimplementasikan mencapai 1,5-2% dari PDB dalam waktu 5 tahun.

### **Kedaulatan dalam Transformasi Bangsa**

Status pengakuan *statehood* Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan dinyatakan secara tegas oleh Presiden ke-1 Soekarno melalui falsafah trisakti, yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai cerminan trilogi nasionalismenya sebelum kemerdekaan dalam bentuk *nationale geest* (roh dan semangat nasional), *nationale will* (kehendak nasional), dan *nationale daad* (perbuatan nasional). Pada era reformasi, Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden ke-8 periode 2024-2029 dari hasil pemilu 2024 mentransformasikan falsafah trisakti dan trilogi nasionalisme Soekarno melalui ungkapan "*Indonesia first, make Indonesia great again*" (VOA Indonesia.com) sebagai identitas legitimasi selama masa pemerintahannya. Bentuk kedaulatan eksternal dalam hubungan antar bangsa diungkapkannya melalui pernyataan "*I want to be your friend, I want to be your partner, but I can not be your peon*" berdasarkan realitas sosial bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah dan bersahabat. Sedangkan implementasi kedaulatan internal yang diimplikasi oleh Prabowo Subianto tercermin dalam ungkapannya, "sekeras halilintar pun genderang perang yang kau tabuhkan padaku, sebusuk bangkai pun sumpah serapah yang kalian semburkan padaku, setajam sembilu pun pedang yang kalian hancurkan padaku, sedalam palung pun kuburan yang kau siapkan untukku, aku tidak akan berperang dengan kalian, karena kalian adalah saudaraku. Aku hanya berperang, jika kalian menjadi pengkhianat dan menjadi perampok bangsa ini (X.com). Pernyataan tersebut mencerminkan identitas dan sikap dalam perjalanan hidupnya selama aktif dalam dunia militer, yaitu *si vis pacem para bellum*, jika menghendaki perdamaian, bersiaplah untuk perang. Bentuk pembangunan identitas nasionalis diatas yang disebut oleh Castells (2010) sebagai identitas proyek (*project identity*), dimana kedaulatan otoritas kepala negara dan pemerintahan dalam membangun struktur kekuasaan dan sistem pengaturannya untuk memelihara tatanan domestik menjadi identitas Indonesia dalam lima tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Jati diri atau identitas politik sebagai cerminan ideologi kebangsaan Prabowo Subianto bersifat dinamis, tidak terbatas pada alam pikiran maupun sistem kehidupan yang memiliki eksistensi materialnya dalam berbagai aktivitas praktis dengan memberikan berbagai aturan bagi tindakan praktis dan perilaku moral, ekuivalen dengan agama dalam makna sekulernya, yaitu pemahaman antara konsepsi dunia dan norma tingkah laku untuk mencapai orientasi politik maupun ekonomi (Maimun, 2015). Konsep Prabowo Subianto membangun kemandirian atau tidak bergantung kepada bangsa lain merupakan ciri atau karakter yang

mengindikasikan maju tidaknya suatu bangsa (Dedi, 2018) dengan pemaknaan apa yang disebut oleh Bung Karno sebagai “berdikari”, berdiri di atas kaki sendiri dan non-kooperatif (Argenti and Istiningdias, 2018), serta kepercayaan diri sebagai bangsa Indonesia untuk mandiri tanpa mengandalkan bantuan bangsa lain untuk memecahkan dan mencari solusi terhadap permasalahan bangsa dengan merujuk pada norma dan cita-cita bangsa dan mengacu pada keadaan yang penuh kemandirian, kreatifitas, keaslian, dan kepercayaan pada kekuatan sendiri untuk menciptakan kebahagiaan (Mawarti & Sundawa, 2016). Realitas itu pula sebagai salah satu indikator terhadap performa kedaulatan bangsa yang melekat pada Prabowo Subianto menjadikannya masuk ke dalam 500 muslim paling berpengaruh di dunia dalam kategori politik berdasarkan daftar World’s 500 Most Influential Muslims 2023 yang dikeluarkan oleh The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC).

Pendidikan tinggi menjadi pilihan Prabowo Subianto dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kampusnya diberi nama Kebangsaan sejak tahun 2002 dan identik dengan spirit nasionalis yang hendak dibangunnya. Hal tersebut tentunya merupakan acuan dalam tata kelola internal dan perilaku insan pimpinan kampus yang mencerminkan nasionalisme dan termanifestasikan dalam kedaulatan kampus ‘Kebangsaan’ untuk mewujudkan tiga misinya: 1). Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang sains, teknologi, seni dan humaniora yang menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan di bidang keilmuannya, mandiri, terbuka, dengan mengedepankan penerapan keilmuan untuk kesejahteraan bangsa, 2). Menyelenggarakan riset/penelitian dasar dan terapan yang inovatif, serta menghasilkan karya yang akan mendukung pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan dan ketahanan bangsa Indonesia; 3). Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terpadu dari sivitas akademika dengan menerapkan solusi berbasis keilmuan bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Kedaulatan kampus menemukan relevansi kuat dalam nasionalisme kebangsaan dengan keluarnya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen sebagai peningkatan tata kelola profesi dan karier dosen yang lebih baik, efektif, dan efisien, serta memberikan kepastian hukum terhadap pemberian tunjangan serta penghasilan bagi dosen. Terbitnya aturan tersebut merupakan respon terhadap regulasi sebelumnya, yaitu Perpres 59/2017 dan Perpres 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang secara garis besar memuat dan mengatur juga SDGs.

Idealnya kampus Kebangsaan merupakan etalase besar bagi transformasi visi Prabowo Subianto dalam pendidikan tinggi, seperti pernyataan Sudirman Said, MBA, Ak, CA (Mantan Menteri ESDM) “bahwa UKRI salah satu kawah candradimuka untuk menyiapkan kader-kader terbaik bangsa, bukti bahwa pak Prabowo visioner, punya pandangan jauh ke depan adalah dengan membangun kampus ini. Beliau paham betul yang namanya negara, bangsa itu yang menentukan adalah kekuatan dari generasi mudanya dan karena itu fokus pada pendidikan, bangun generasi, bangun *skill*. Yang terbaik bukan hanya otak tetapi akhlak dan hati. Lewat pendidikan, lewat UKRI insya Allah visi beliau akan terlaksana, terwujud dengan menjadikan UKRI sebagai salah satu kawah candradimuka menyiapkan kader-kader terbaik bangsa” (<https://www.youtube.com/watch?v=1AuvTtWGP9M>-UKRI TV, 2019). Demikian pula yang disampaikan oleh pakar ekonomi Dr. Ichsanuddin Noorsy, SH, M.Si: “ketika isu di dunia melemparkan satu tema *the End of Ideology*, semua orang sepakat bahwa seolah ideologi dan kebangsaan telah berakhir. Padahal dalam sejarah umat manusia, ideologi dan kebangsaan tidak pernah berakhir, maka ketika Prabowo Subianto mendirikan Universitas Kebangsaan, itu menunjukkan jangkauan pemikiran Prabowo Subianto yang jauh. Kedua, ketika ingin jadi pemimpin dan punya universitas sendiri menunjukkan punya dapur sendiri, punya *think tank* sendiri. Seluruh pemimpin dunia pada hakikatnya punya *think tank* sendiri, Cuma persoalan pokoknya apakah *think tank*-nya cukup memadai atau tidak posisinya. Yang ketiga, tantangan ke depan adalah *tribalism* yang basisnya, rujukannya akan menjadi kebangsaan. Anda lihat Elizabeth Warren ketika tampil sebagai calon presiden untuk Amerika Serikat bicaranya tetap *tribalism*. Beberapa suku yang unggul di dunia tetap

bicara *tribalism*, tetap rujukan akhirnya kebangsaan. Dan dalam sejarah umat manusia, urusan kebangsaan tidak pernah selesai ketika rujukannya bagaimana dapur kebangsaan itu adalah keilmuan. Problem ke-empat adalah mempertemukan seperti terjadi di Jepang bahwa setiap perguruan tinggi menjadi basis berfikirnya bagi sebuah pemerintahan. Ada *landscape* pengetahuan yang punya hubungan dengan *landscape* politik, sehingga politik punya hubungan dengan pengetahuan, pengetahuan punya hubungan dengan politik. Nah itu tampaknya yang dilakukan pak Prabowo Subianto dengan Universitas Kebangsaan. Yang terakhir, kalau *landscape* ilmu pengetahuan bertemu dengan *landscape* politik, maka politiknya bukan politik pragmatis atau politik oportunistis. Dia, politik dalam rangka menegakkan kebenaran, dan kalau bicaranya kebenaran, maka perspektifnya adalah keadilan, nah itu yang paling mahal” (UKRI TV 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=bbpS6oDp8>).

Dua pernyataan di atas mewakili banyak persepsi yang mengasumsikan kampus Kebangsaan sekuat identitas dan reputasi pemiliknya. Melalui Yayasan Pendidikan Kebangsaan yang memayungi kampus Kebangsaan, Prabowo Subianto sebagai pemilik dan ketua yayasan telah memberikan mandat kepada pimpinan kampus untuk mengelola dan menjalankannya sesuai dengan naungan regulasinya. Kedaulatan menjadi prerogatif penerima amanah yang tercermin melalui *leadership* (kepemimpinan) dan *governance system* (penatakelolaan) kampus Kebangsaan. *Leadership* dan *governance* merupakan titik awal narasi pembuka terhadap kebijakan makro sebagai output yang dihasilkannya untuk mengokohkan jati diri kelembagaan kampus Kebangsaan dalam bentuk Statuta, RIP, Renstra, dan Renop. Kebijakan makro sebagai kampus otonom menjadi landasan operasional yang memengaruhi gerak langkah kampus Kebangsaan, yaitu: 1). Untuk memenuhi dan memandu sistem penjaminan mutu terpadu dalam mengembangkan visi, misi, tujuan, dan sasaran, dimana isinya akan terlihat dari tata kelola organisasi kampus, tata kelola sumber daya manusia, dan tata kelola keuangan; 2). Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas dosen dan rekognisi untuk nasional/internasional, serta peningkatan kualifikasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan; 3). Peningkatan kualitas luaran mahasiswa melalui penguatan tridarma dan kemahasiswaan untuk rekognisi internasional; dan 4). Memiliki rancangan besar informasi terpadu dengan pembaharuan asset dan fasilitas sarana prasarana. Eksistensi kampus Kebangsaan terlihat dari posisi klusterisasinya masih berada di kategori pratama berdasarkan Pengumuman Klusterisasi PT Tahun 2024 dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dirjen Dikti Nomor: 1639/E5/AL.04/2023. Kondisi objektif tersebut bertaut dengan faktor subjektif *leadership* dan *governance* pimpinan sebagai representasi kedaulatan dan otonomi kampus yang akan menentukan langkah, arah, dan masa depan kampus Kebangsaan, apakah akan menjadi kampus unggul dengan salah satu pemenuhan indikatornya adalah melalui penelitian dan publikasi dosen dengan mahasiswa secara kualitatif dan kuantitatif dalam artikel bereputasi terindeks nasional dan internasional serta disitasi, kolaborasi penelitian internasional, pengabdian kepada masyarakat internasional, dan kolaborasi penelitian plus pengabdian kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Nasionalisme kebangsaan Indonesia muncul sejak Sumpah Pemuda tahun 1928 dan diterima sebagai negara-nasional setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nasionalisme dan kedaulatan terus diperjuangkan oleh para tokoh bangsa melalui diplomasi dalam berbagai forum internasional dan perlawanan fisik terhadap bangsa kolonial meski telah memproklamirkan sebagai negara merdeka dan berdaulat. Visi Presiden ke-1 Soekarno terhadap nasionalisme dan kedaulatan berlandaskan pada falsafah trisakti, yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Trilogi falsafah trisakti dan nasionalisme Soekarno era kemerdekaan dalam bentuk *nationale geest* (roh dan semangat nasional), *nationale will* (kehendak nasional),

dan *nationale daad* (perbuatan nasional) ditransformasikan pada era reformasi oleh Prabowo Subianto Presiden ke-8 periode 2024-2029 melalui ungkapan “*Indonesia first, make Indonesia great again*” sebagai identitas legitimasi selama masa pemerintahannya. Bentuk kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal dalam hubungan antar bangsa diungkapkannya melalui pernyataan “*Si Vis Pacem Para Bellum dan I want to be your friend, I want to be your partner, but I can not be your peon*” berdasarkan realitas sosial bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah dan bersahabat.

Kedua Presiden memiliki kesamaan dalam visi nasionalisme dan kedaulatan memandang paham neoliberalisme, dimana Soekarno mengungkapkannya dengan istilah anti nekolim, sedangkan Prabowo Subianto menyatakan bahwa paham ekonomi kapitalisme neo-liberal telah terbukti gagal menyejahterakan rakyat. Perwujudan visi nasionalisme dan kedaulatan Soekarno adalah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, sedangkan Prabowo Subianto membangun kemandirian atau tidak bergantung kepada bangsa lain serta kepercayaan diri sebagai bangsa Indonesia untuk mandiri tanpa mengandalkan bantuan bangsa lain untuk memecahkan dan mencari solusi terhadap permasalahan bangsa dengan merujuk pada norma dan cita-cita bangsa dan mengacu pada keadaan yang penuh kemandirian, kreatifitas, keaslian, dan kepercayaan pada kekuatan sendiri. Kemandirian dalam kedaulatan dilakukan Prabowo Subianto dalam mencerdaskan bangsa melalui pendidikan tinggi dengan mendirikan kampus Kebangsaan. Nasionalisme primordial dan nasionalisme modernis menjadi identitas resisten, identitas legitimasi, dan identitas proyek tersemat pada Soekarno dan Prabowo Subianto sebagai identitas patriotisme menghadapi kondisi obyektif empiris bangsa pada eranya masing-masing sebagai Presiden ke-1 dan Presiden ke-8 Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurahman, D. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Adam, A. W. (2007). *Pelurusan Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Adams, C. (2011). *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: PT. Media Pressindo
- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Brenner, N. (2004). *New State Spaces: Urban Governance and the Rescaling of Staehood*. Reprinted. Oxford: Oxford University Press.
- Castells, M. (2010). *The Power of Identity. 2<sup>nd</sup> Edition*. Oxford, UK: Wiley-Blackwell Publishing Ltd.
- Gellner, E. (2006). *Nations and Nationalism. 2<sup>nd</sup> Edition*. Malden, Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Hearn, J. (2020). *Rethinking Nationalism: A Critical Introduction*. London: Bloomsbury Academic.
- Heywood, A. (2014). *Global Politics*. Second Edition. New York: Palgrave McMillan.
- Hobsbawm, E. (2012). *Nations and Nationalisme since 1780*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ismaun. (2005). *Sejarah Sebagai Ilmu*. Bandung: Histori Utama Press.
- Kedourie, E. (1986). *Nationalism*. London: Hutchinson University.
- Nasir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. et.al, (2000). *Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach, 6th Edition*. Boston: Allyn and Bacon.
- Patten, M. L. & Newhart, M. (2018). *Understanding Research Methods. An Overview an Essentials*. 10th Eds. New York: Routledge-Taylor & Francis.

Sabarudin (2024). *Diskursus Ekonomi: Perdebatan Pertaruhan Ideologi dan Politik dalam Ruang Publik. Relasi Ekonomi-Politik-Hukum dan Opini Publik. Tinjauan Omnibus Law Cipta Kerja*. Depok: Rajawali Pers-PT. RajaGrafindo Persada.

Schumpeter, J. (1994). *History of Economic Analysis*. London: Routledge.

Smith, A. D. (2008). *The Ethnic Origin of Nations*. Oxford: Blackwell.

Subianto, P. (2023). *Strategi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045: Indonesia Menjadi Negara Maju dan Makmur*. Cetakan ke 4. Jakarta: PT. Media Pandu Bangsa.

#### **Buku Kumpulan Artikel**

Cerny, F. G. (2013). Globalization and Statehood, dalam M. Beeson dan N. Bisley (ed). *Issues in 21st Century World Politic*. Basingstoke: Palgrave McMillan.  
[http://dx.doi.org/10.1007/978-1-137-15470-5\\_3](http://dx.doi.org/10.1007/978-1-137-15470-5_3)

#### **Artikel dalam Jurnal/Majalah**

Argenti, G. & Dias, D. S. I. (2018). Soekarno's Political Thinking about Guided Democracy. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(2), 46-63. <https://doi.org/10.35706/JPI.V3I2.1654>

Dedi, A. (2018). Pemikiran Politik Soekarno, Bung Hatta, dan Tan Malaka dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 527-532. <https://doi.org/10.25157/DINAMIKA.V4I4.873>.

Mawarti, R. A., & Sundawa, D. (2016). Peranan Civic Community dalam Mendorong Pemuda sebagai Pelopor Kemandirian Bangsa (Studi kasus pada komunitas "Pasukan Kresek" di Kabupaten Malang Jawa Timur. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 16(2), 63-84. <https://doi.org/10.19109/NURANI.V16I2.934>.

Sabarudin, D. (2021). Political Communication Based on Identity Politics and Social Networking Media in the Period 2012-2017 DKI Jakarta Governor Election. *Jurnal Komunikasi dan Bisnis*, Vol.IX, No.2,111-125. <https://doi.org/10.46806/jkb.v9i2.770>.

#### **Dokumen Resmi**

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

#### **Makalah Seminar, Lokakarya, Penataran**

Maimun. (2015). Aktualisasi Pendidikan Keteladanan dalam Meredam Ideologi Radikal di Indonesia Memperkokoh Jatidiri PKn. *Prosiding Seminar Nasional: Penguatan Komitmen Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKn*, 255-263. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.